



**PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023 - 2026

RENCANA STRATEGIS

2023 -2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2022



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 42 /DISKOMINFO/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Intruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, maka perlu menyusun dan menelaraskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kabupaten Sarolangun pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 25 Mei 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN



DRS. MUHAMMAD IDRUS
NIP. 197410121993021001
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 42 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2023-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2026

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun
3.	Anggota :	1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi & e-Government 2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 3. Kepala Bidang Statistik Sektoral 4. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset 7. Staf Bagian Perencanaan Program (YESI GUSMANIAR) 8. Staf Bagian Keuangan dan Asset (Mega Mustika, S,ST)

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 25 Mei 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN


DRS. MUHAMMAD IDRUS
NIP. 19741012 199302 1 001
Pembina Utama Muda

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 – 2026 telah dapat diselesaikan secara baik, Sebagai aplikasi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, serta Intruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

Untuk menjabarkan keterkaitan tujuan dan sasaran strategis perencanaan pembangunan daerah, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2026. Dokumen ini menggunakan pokok-pokok pikiran pembangunan bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian serta kinerja permasalahan dan tantangan, tujuan dan sasaran, strategi kebijakan serta program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Rencana strategi disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya serta dinamika lingkungan strategis pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rancangan Dokumen Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sarolangun, Februari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN

Drs. MUHAMMAD IDRUS
Pembina Utama Muda / IV.c

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7
	2.1 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	7
	2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	19
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	39
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	45
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	47
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	47
	3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Provinsi.....	50
	3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	57
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	58
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	59
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.....	59
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
	5.1 Strategi dan arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika	61
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	64
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
	7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	80
BAB VIII	PENUTUP	83

LAMPIRAN

Tabel 2.3	41
Tabel 3.1	47
Tabel 4.1	60
Tabel 5.1	62
Tabel 6.1	65
Tabel 7.1	81

BAB - I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dalam rangka menjalankan intruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Yang berfungsi sebagai acuan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan yang bersifat komprehensif yang dituangkan kedalam renja tahunan perangkat daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi komunikasi dituntut mampu memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dengan fungsi pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e-government yang secara teknis terlindungi keamanan informasinya serta tersajikannya data statistik sektoral yang benar lengkap dan utuh sebagai data acuan perencanaan di Kabupaten Sarolangun. Oleh sebab itu maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No. 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berpatokan pada RPD Kabupaten Sarolangun serta memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan terkait, Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi.

I.2. LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemda;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknologi Informasi.
13. Instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Pengembangan e-Government.

14. Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
15. Peraturan Menkominfo RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Menkominfo RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo.
17. Permendagri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Permendagri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Permendagri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Permenkominfo RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
21. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Intruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
24. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 17);
29. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Perangkat Daerah setelah penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun bagian Kesembilan Belas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan Sebagai
 - a) Dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun untuk kurun waktu 4 (empat) Tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026;
 - b) Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 4 (empat) Tahun.
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan tujuan :
 - a). Memberikan arah pembangunan pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
 - b). Menyediakan dokumen sebagai acuan resmi bagi seluruh aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dalam rangka menentukan prioritas program kegiatan dan sub kegiatan kurun waktu 2023-2026 yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten.

- c). Menjabarkan tentang gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun kondisi sekarang dan yang ingin dicapai pada empat tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sarolangun
- d). Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun untuk memahami serta menilai arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan, operasional tahunan rentang waktu empat tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun

Bab ini memuat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sarolangun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

BAB - II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo

Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Perangkat Daerah setelah penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun bagian Kesembilan Belas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Konkuren yang meliputi :

- a. Urusan wajib pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- b. Urusan wajib pemerintahan bidang statistik sektoral; dan
- c. Urusan wajib pemerintahan bidang persandian/keamanan informasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- e. Pelaksanaan dokumentasi dan desiminasi dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;

- f. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- h. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 1 (satu) Pejabat Eselon II, 5 (Lima) unit kerja Eselon III yang dibantu oleh 1 eselon IV di Sekretariat dan 8 orang jabatan fungsional penyetaraan dari eselon IV dan 3 orang Jabatan Fungsional Khusus, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :



PERBUP NO. 35 TAHUN 2022
TANGGAL 25 MEI TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO SAROLANGUN



KEPALA DINAS
Drs. MUHAMMAD IDRUS
Pembina Utama Muda/ IV.c
19741012 199302 1 001

SEKRETARIS
SUGENG MULYADI ESSA, S.T
Pembina / IV.a
19711011 200312 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
NAMA	
1. INDRAWATI, S.E	7. KHOIRONI, S.H
2. EKO HARYANTO, S.Kom, M.E	8. SIWUH TEGUH WIBOWO, S.Kom
3. ZURNI, S.E	9. RIZKY RAMADHAN, S.Kom
4. AKMALIYANI, S.H.I	10. DEDI SURYADI, A.Md
5. FIRDAUS, SE	11. LIONA CHRISTY, A.Md
6. IMA RAHMI, S.IP	

UMUM DAN KEPEGAWAIAN
M. RIDWAN, S.E

STAF

1. RINA UTAMI, A.Md
2. EVI SURYANI
3. YESHI KAMELIA H, S.Pd
4. GUSWATI
5. NUR MUHAMMAD
6. M. ROZI HISTANTO

BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

STAF

1. HANISAH
2. ERMAWATI
3. MEGA MUSTIKA, SST

BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM

STAF

1. LISMARNI, A.Md
2. YESI GUSMANIAR

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
MUHAMMAD IQBAL., S.E., M.M
Pembina / IV.a
19741102 200701 1 013

STAF

1. WAGIMIN
2. DESMIRA
3. BAGUS AMBAR RUKMA JATI
4. ROSMANI, A.Md
5. YENGI
6. RIZKI FITRIAH
7. BOBY HANDOKO, S.Kom
8. ISHI DESPI ARIZA PUTRI, S.Ds
9. MUHAMMAD IMRON, S.Kom

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN E-GOVERNMENT
MUHAMMAD FACHRY, S.T., M.M
Pembina / IV.a
19780212 200312 1006

STAF

1. ARDAVID ITKA, ST
2. FERI PRATAMA, S.Kom

BIDANG STATISTIK SEKTORAL
NADA INDAH, S.KOM
Penata / III.c
19750923 201001 2 006

STAF

1. MUKHLISIN, S.IP

BIDANG KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN
ERI SISWANTO, S.KOM
Penata / III.c
19790414 201101 1 007

STAF

1. NOVA FITRIANA, A.Md
2. EKA PUTRI INDIRIYANA

UPTD

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government;
5. Bidang Statistik Sektoral;
6. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kebijakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi termasuk kehumasan Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- b. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;

- e. pelaksanaan dokumentasi dan desiminasi dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- f. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi;
- h. pelaksanaan administrasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral dan bidang persandian/keamanan informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun, membina, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi, mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan termasuk bidang-bidang dan fungsional dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan pedoman teknis dan standar perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan termasuk bidang-bidang dan fungsional di lingkungan Dinas komunikasi dan informatika;

- b. pelaksanaan perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan perencanaan, program dan kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan termasuk bidang-bidang dan fungsional di lingkungan Dinas komunikasi dan informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun, menyiapkan, menata, mengelola, mengamankan, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi, mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan di bagian kepegawaian daerah, sarana prasarana dan keprotokolan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman teknis dan standar peraturan perundang-undangan di bagian kepegawaian daerah, analisis peta dan kelas jabatan, kebutuhan pegawai, beban kerja, uraian tugas dan fungsi, struktur organisasi, kebutuhan sarana prasarana dan keprotokolan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. penatausahaan, pengelolaan dan pengamanan sarana prasarana perkantoran dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. penyiapan administrasi surat menyurat, arsip, bahan rapat/pertemuan, absensi kehadiran pegawai, rapat, pertemuan dan upacara/apel gabungan;
- d. penyiapan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dari jabatan struktural dan fungsional;
- e. penyiapan administrasi kesejahteraan pegawai, gaji berkala, penerima penghargaan, peserta pendidikan dan pelatihan, kartu pegawai, kartu suami/istri, cuti, pensiun dan surat peringatan/teguran disiplin;
- f. pengelolaan dan memperbarui informasi data kepegawaian dan kinerja pada sistem informasi kepegawaian daerah;
- g. pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian daerah, sarana prasarana dan keprotokolan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kepegawaian daerah, sarana prasarana dan keprotokolan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kepegawaian daerah, sarana prasarana dan keprotokolan;
- j. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, sarana prasarana dan keprotokolan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola Informasi dan Komunikasi Publik, merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, mengelola konten dan perencanaan media komunikasi publik, mengelola media komunikasi publik, layanan informasi publik, layanan hubungan media, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, menguatkan kapasitas sumber daya komunikasi publik, menguatkan tatakelola Komisi Informasi di daerah serta menyelenggarakan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan pedoman teknis dan standar peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. pengelolaan media komunikasi publik;
- f. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- g. pelaksanaan layanan hubungan media;
- h. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- k. penguatan tatakelola Komisi Informasi di daerah;
- l. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;

- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- o. Pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government

Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah, sinkronisasi penyusunan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, mengelola pusat data pemerintahan daerah, menyelenggarakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, koordinasi keamanan informasi, koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik, mengembangkan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah, mengembangkan dan mengelola ekosistem kabupaten/kota cerdas, mengembangkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah serta mengelola *Government Chief Information Officer (GCIO)*.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan *e-Government* mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan pedoman teknis dan standar peraturan bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan *e-Government*;
- b. pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- c. pengelolaan pusat data pemerintahan daerah;

- d. Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi keamanan informasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- g. pelaksanaan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- i. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas;
- j. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- l. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government;
- n. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah, koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu statistik daerah yang terintegrasi, membangun metadata statistik sektoral, meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, mengembangkan infrastruktur dan menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral di daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan pedoman teknis dan standar peraturan Bidang Statistik Sektoral;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- d. Pelaksanaan membangun metadata statistik sektoral;
- e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- f. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur;
- g. Pelaksanaan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah.
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Bidang Statistik Sektoral;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Statistik Sektoral;
- j. Pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Statistik Sektoral; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah, menetapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah, melaksanakan analisis kebutuhan dan mengelola sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah, melaksanakan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis

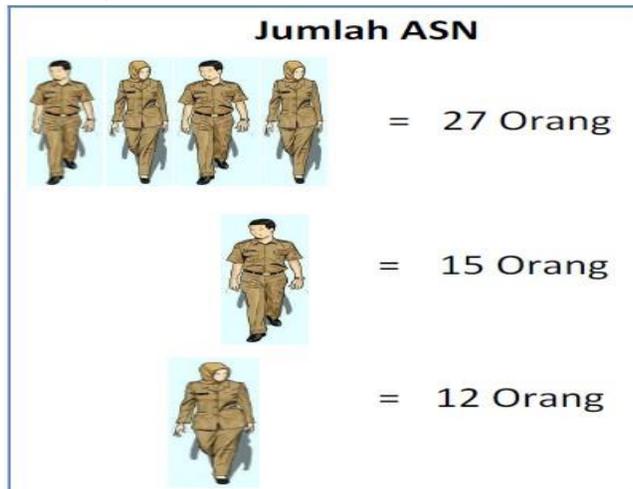
elektronik dan non elektronik, menyediakan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan pedoman teknis dan standar peraturan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
- g. pelaksanaan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah.
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- k. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika

1. Sumber Daya Manusia



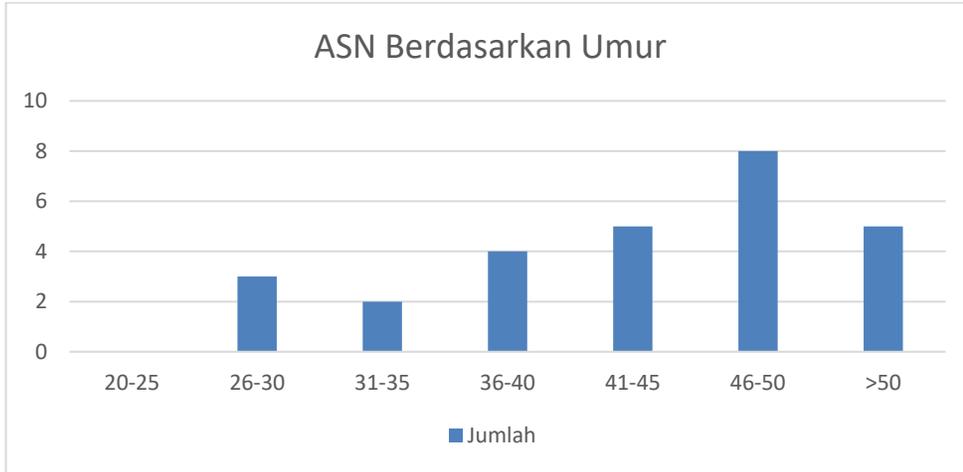
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun didukung oleh 43 orang yang terdiri dari 27 orang ASN dan

16 orang Honda yang terdiri dari 15 orang Pejabat Struktural dan 1 orang Pejabat Fungsional Umum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah ASN Berdasarkan Kelompok Umur

No	Bidang	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	2	1	3	2	9
2	Bidang TIK dan E-Gov	-	2	1	-	2	-	-	5
3	Bidang IKP	-	-	-	-	1	3	2	6
4	Bidang Statistik	-	-	-	1	-	1	1	3
5	Bidang Persandian	-	1	-	1	1	1	-	4
Jumlah									27

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian



Tabel 2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Gol IV			Gol III			Gol II				Jumlah	
	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B		A
LK	1	-	3	4	2	2	1	1	1	-	-	15
PR	-	-	-	3	2	-	3	3	1	-	-	12
Jumlah												27

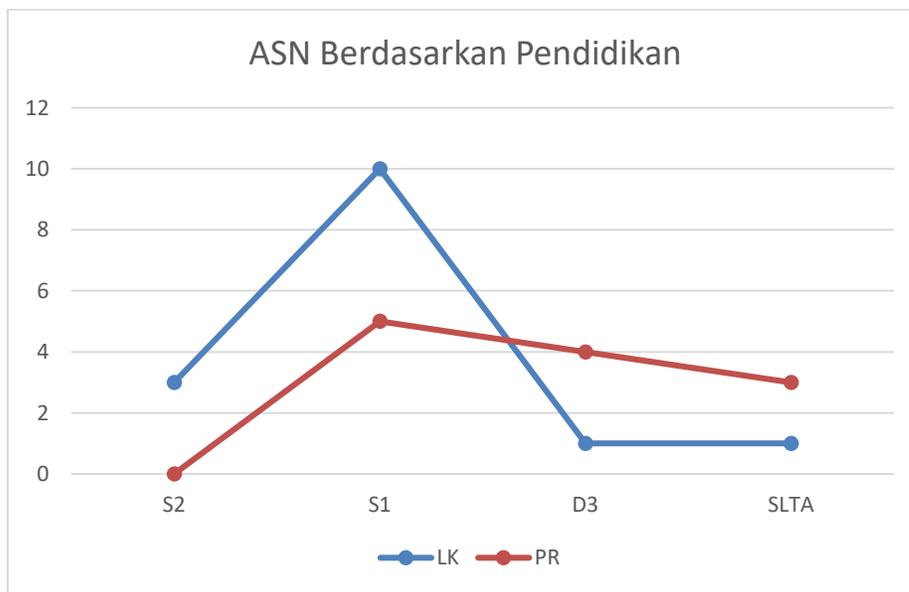
Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian



Tabel 3. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	S2	S1	DIP	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
LK	3	10	1	1	-	-	15
PR	-	5	4	3	-	-	12
Jumlah							27

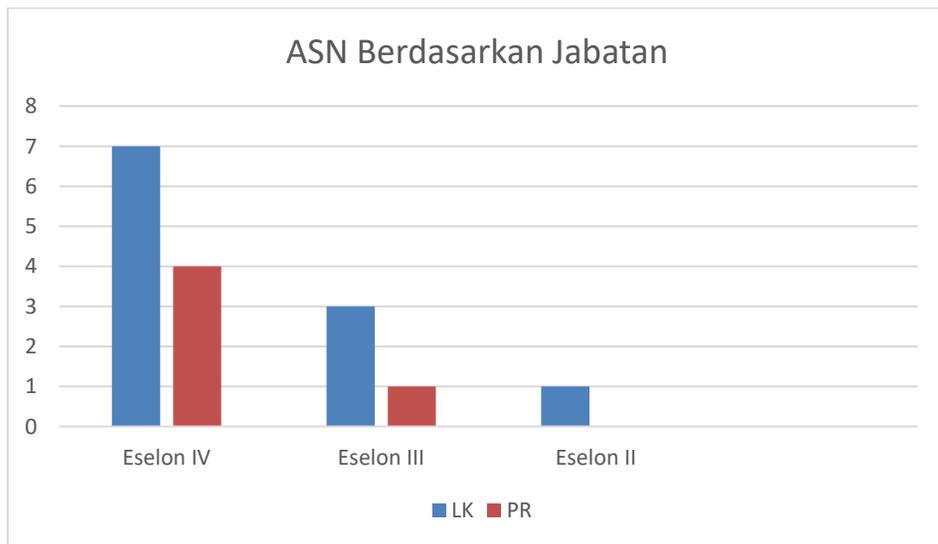
Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian



Tabel 4. Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon III.b	Eselon IV.a	Fungsional Tertentu	Fungsional Pelaksana (Staf)	Jumlah
LK	1	1	2	7	-	4	15
PR	-	-	1	4	-	7	12
Jumlah							27

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian



2. Sarana dan Prasarana Penunjang

a. Kondisi Infrastruktur Dasar Pelayanan Public.

NO.	NAMA PERALATAN	OPERASIONAL	LOKASI
1.	5 (Lima)	Yang diperuntukan :	Dinas Kominfo
	Unit Server dan Kelengkapannya	1. 1 (satu) Unit Server TIK -01 - Dinas Pendidikan : disdik.sarolangunkab.go.id - Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH): Jdih.sarolangunkab.go.id	Kab.Sarolangun
		2. 1 (satu) Unit Server TIK -02 - Inspektorat: stli.itkab.sarolangunkab.go.id - SIMHON (sistem Informasi Honorer): Simhon.bkp2d.sarolangunkab.go.id	
		3. 1 (satu) Unit Server TIK -03 - Sistem Infomasi Manajemen Daerah (SIMDA) - Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	
		4. 1 (satu) Unit Server website	
		5. 1 (satu) Unit Server E-Office	
2.	Bandwidth	Sewa Bandwidth yang berguna untuk akses internet/ Intranet ke seluruh OPD lingkup Pemkab Sarolangun	Dinas Kominfo Kab.Sarolangun
3.	Infrastruktur Jaringan Internet/ Intranet	Terkoneksinya jaringan internet/intranet melalui - Kabel FO (OPD dalam Komplek Perkantoran) - Radio Link (OPD diluar Komplek Perkantoran)	OPD, Rumah Dinas bup
4.	Fasilitas Internet/ Intranet OPD	Akses Internet gratis yang menggunakan Bandwidth Dari Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun	OPD,Rumah Dinas bup.
5.	Fasilitas Wifi OPD	Akses internet gratis melalui Wifi (Hotspot Area) Yang dipasang di seluruh OPD	OPD,Rumah Dinas Bup,

PENJELASAN ISI TABEL :

1. 5 (Lima) unit server beserta kelengkapannya.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlah diperlukan sebagai pendukung untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun yang terus berupaya dalam meningkatkan Teknologi Informasi melalui Website dan Aplikasi Pemerintahan yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun agar

cerdas dan terampil dalam menggunakan Media Informasi secara Elektronik (Komputer), untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan percepatan dalam meningkatkan kualitas Teknologi Informasi dan dengan didukung peralatan-peralatan komputerisasi dan server yang berkualitas, sehingga dapat mempercepat proses administrasi Pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat.

SERVER DATA CENTER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2022

No	Spesifikasi Server	Jumlah	Kapasitas HDD	Tahun Peroleha	Kondisi	Kegunaan
A. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	HP ProLiant DL370 G6, Processor Intel Xeon X5672 LGA 1366 3.2GHz 12MB Cache (2 kit) Ram 96 GB DDR3 8x12 10600R OS : CentOS 7	1	146 GB	2011	Rusak	Aplikasi SPSE
2	HP ProLiant DL180 Gen6 Processor Intel Xeon CPU E5620 @ 2,4 Ghz 8 Cores Ram 8 Gb OS : Ubuntu	1	250 Gb	2012	Baik	Aplikasi e-Office
3	HP ProLiant DL180 Gen6, Processor Intel Xeon CPU E5620 @ 2,4 Ghz 8 Cores Ram 8 Gb OS : CentOS 7	1	250 Gb	2011	Baik	Aplikasi Observium, JDIH, JDIH DPRD
4	HP ProLiant DL160 Gen8 Processor Intel Xeon CPU E5620 @ 2,4 Ghz 8 Cores Ram 4 Gb OS : Ubuntu	1	500Gb	2014	Rusak	Aplikasi Adopsi Bandung

No	Spesifikasi Server	Jumlah	Kapasitas HDD	Tahun Peroleha	Kondisi	Kegunaan
5	HP ProLiant DL160 Gen8, Processor Intel Xeon CPU E5620 @ 2,4 Ghz 8 Cores, Ram 4 Gb OS : Ubuntu	1	500 Gb	2014	Baik	Aplikasi e-Planning
6	HP Proliant DL180 Gen9 Intel Xeon CPU E5-2620 @2,1 Ghz 16 Cores Ram 8 Gb OS : CentOS 7	1	1 TB	2017	Baik	Aplikasi Cloud Bappeda
7	Dell Power Edge 730 Intel Xeon CPU E5-2620 v4 @ 2,1 Ghz 16 Cores Ram 16 Gb OS : CentOS 7	1	1 TB	2018	Baik	Sitorek, Simpebaja, Website OPD, dll
8	HPE Proliant DL380 Gen 10 Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz 16 Cores Ram 32 GB OS : Proxmox	1	5 TB	2020	Baik	Virtual Server, BKPSDM, Web Sarolangun
B. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
9	DELL Power Edge 720, Intel Xeon E5-2650v2 x 2 Proc 2.6GHz 8 cores x 2 (16 cores, 32 threads) RAM 32GB DDR3 REG ECC (16GB x 2pcs) OS : Windows Server	3	1 TB	2014	Baik	Aplikasi SIPKD, ASET, dan SIMDA
C. BAGIAN PEMBANGUNAN						

No	Spesifikasi Server	Jumlah	Kapasitas HDD	Tahun Peroleha	Kondisi	Kegunaan
10	HP Proliant DL180 Gen9 Intel Xeon CPU E5-2620 @2,1 Ghz 16 Core Ram 8 Gb OS : CentOS 7	1	300 GB	2017	Baik	Aplikasi E-Monev
D. BAGIAN UMUM						
11	Dell Power Edge R330 Intel Xeon E3-1220 v6 @3.00 Ghz 4 Core Ram 32GB OS : ProxMox	2	2 TB	2019	Baik	E-Mail daerah, dan Virtual Server
E. DINAS KESEHATAN						
12	HP Proliant DL20 Gen9 Intel Xeon CPU E3-1230 V5 @ 3,4Ghz 8 Cores Ram 16 Gb OS : Windows Server	1	1 TB	2017	Baik	Offline
F. SEKRETARIAT DPRD						
13	DELL Intel Xeon CPU E3-1230 V5 @ 3,4Ghz 8 Cores Ram 32 Gb OS : CentOS 7	1	1 TB	2021	Baik	JDIH Kab. Sarolan
	Total	15				

PEMANFAATAN APLIKASI BERBAGI PAKAI UNTUK OPD DI LINGKUNGAN
PEMKAB SAROLANGUN

No.	Aplikasi	Deskripsi	Admin Aplikasi	Pengguna
1.	SP4N-LAPOR	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia.	Diskominfo	Seluruh OPD
2.	SRIKANDI	Aplikasi Umum Persuratan dan Kearsipan Dinamis untuk Perkantoran. Telah ditetapkan sebagai aplikasi umum oleh Kementerian PAN-RB melalui Keputusan Menteri PAN-RB No. 679 tahun 2020.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Seluruh OPD
3.	SICANTIK	Aplikasi perizinan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai (Cloud Service) yang dimanfaatkan untuk layanan perizinan non berusaha dan non perizinan secara elektronik di daerah.	DPMPTSP	Pelaku Usaha dan non usaha
4.	SIDEKA-NG	Merupakan salah satu aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional yang diperuntukan bagi pemerintah tingkat desa/kelurahan dalam meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.	Dinas P.M.D	Pemerintah Desa/Kelurahan

No.	Aplikasi	Deskripsi	Admin Aplikasi	Pengguna
5.	DASAWISMA	<p>Sistem Informasi Manajemen Dasawisma merupakan aplikasi berbasis website yang dapat menjadi solusi dari berbagai kegiatan PKK. Beragam pendataan kegiatan Dasawisma, seperti pendataan Keluarga, pendataan Aktivitas Warga, pendataan Catatan Kelahiran atau Kematian, dan lainnya.</p> <p>Layanan pendataan mengenai rumah tinggal termasuk aspek lingkungan, keluarga, anggota keluarga dan aspek sosialnya serta merupakan ujung tombak pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.</p>	Dinas PMD / TP.PKK	TP.PKK
6.	e-POSYANDU	Aplikasi ePosyandu adalah aplikasi untuk digitalisasi layanan yang ada di posyandu dan pelaporan data posyandu secara berjenjang.	DINKES / DPPKB	DINKES / DPPKB
7.	BANK SAMPAH	Aplikasi Bank Sampah adalah Aplikasi Pengelolaan Sampah untuk memudahkan pengelolaan data transaksi sampah di Bank Sampah.	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Pengelola Bank Sampah
8.	DESA WISATA	Aplikasi ini dibangun untuk dapat mempermudah ketersediaan informasi desa wisata di Indonesia beserta atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.	DISPARPORA	DISPARPORA

No.	Aplikasi	Deskripsi	Admin Aplikasi	Pengguna
9.	Sistem Informasi Kapasitas Sumber Daya Manusia Terpadu Berbasis Cloud	Platform yang terdiri dari layanan diklat dan wawasan kebangsaan untuk menciptakan ASN yang unggul dan berintegritas, serta mengembangkan kompetensi secara profesional dengan memanfaatkan TIK untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, efektif, dan efisien serta terhindar dari paham radikalisme dan sikap intoleransi.	BKPSDM	BKPSDM
10.	EMAIL SISWA	Email siswa nasional merupakan layanan persuratan elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh siswa/peserta didik.	DISDIKBUD	DISDIKBUD
11.	MAIL.GO.ID	Penyediaan layanan surat elektronik (email) secara khusus untuk ASN dan perangkat desa.	DISKOMINFO	Seluruh ASN dan Perangkat Desa/kelurahan
12.	MAIL MULTIDOMAIN	Penyediaan secara khusus surat elektronik (e-Mail) untuk elemen pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kota/kabupaten.	DISKOMINFO	Pemerintah Kabupaten
13.	REDKAR	REDKAR digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh relawan pemadam kebakaran mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14.	Aplikasi Satpol PP	SIJAFPOLPP atau Sistem Informasi Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aplikasi untuk mengelola urusan administrasi terkait jabatan fungsional Satpol PP.	Satpol PP	Satpol PP

DAFTAR APLIKASI DAN SUBDOMAIN YANG DIMILIKI OPD KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI	PENGELOLA	SUB DOMAIN	STATUS
1	STLI	Sistem Tindak Lanjut Inspektorat	Inspektorat	stli.itkab.sarolangunkab.go.id	OFFLINE
2	WBS	Whistle Blowing System	Inspektorat	wbs.sarolangunkab.go.id	RUNNING
3	SIMHON	Sistem Informasi Tenaga Honorer / Kontrak	BKPSDM	simhon.sarolangunkab.go.id	RUNNING
4	SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	BKPSDM	simpeg.sarolangunkab.go.id	RUNNING
5	CYDESI	Competency Development System (DIKLAT)	BKPSDM	cydesi.sarolangunkab.go.id	RUNNING
6	e-PLANNING	Sistem Perencanaan Daerah	BAPPEDA	eplanning.sarolangunkab.go.id	RUNNING
	Cloud BAPPEDA	Penyimpanan Data cloud	BAPPEDA	cloudbappeda.sarolangunkab.go.id	RUNNING
7	e-BUDGETING (SIPKD)	Sistem Informasi Penganggaran	BPKAD	ebudgeting.sarolangunkab.go.id	RUNNING
8	SIPKD ASET	Sistem Informasi Pendataan Aset Daerah	BPKAD	aset.sarolangunkab.go.id:90	RUNNING
	e-MONEV	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	Bag. Pembangunan SETDA	emonev.sarolangunkab.go.id	OFFLINE
9	JDIH SAROLANGUN	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bag. Hukum Setda	jdih.sarolangunkab.go.id	RUNNING
10	JDIH Android	Aplikasi Upload Dokumen ke Aplikasi berbasis Android	Bag. Hukum Setda	server-android.sarolangunkab.go.id	RUNNING

NO	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI	PENGELOLA	SUB DOMAIN	STATUS
11	JDIH DPRD	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD	Sekretariat DPRD	jdih.dprd.sarolangunkab.go.id	RUNNING
12	e-SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Online	Bag. Organisasi Setda	sakip.sarolangunkab.go.id	RUNNING
13	EPAD PBB	Sistem Informasi PAD	BPPRD	epad.sarolangunkab.go.id	RUNNING
14	INFO TAGIHAN PBB	Sistem Informasi Tagihan PBB	BPPRD	infotagihan.sarolangunkab.go.id	RUNNING
15	EBPHTB	BPHTB Elektronik	BPPRD	ebphtb.sarolangunkab.go.id	RUNNING
16	Epayment	Pembayaran PBB Online	BPPRD	epayment.sarolangunkab.go.id	RUNNING
17	SIMPBB	Sistem Informasi Manajemen Pajak	BPPRD	simpbb.sarolangunkab.go.id	RUNNING
18	Report Pajak	Laporan Pajak	BPPRD	reportpajak.sarolangunkab.go.id	PROSES
19	SPSE	Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik	BPBJ	lpse.sarolangunkab.go.id	RUNNING
20	SIMPEBAJA	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	BPBJ	simpebaja.sarolangunkab.go.id	RUNNING
21	SITOREK	Sistem Informasi Monitoring Proyek	PUPR	sitorek.sarolangunkab.go.id	RUNNING
22	SIKEMAS	Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat	DINKES	sikemas.sarolangunkab.go.id	RUNNING
23	PMKS	Data Sosial Masyarakat Kurang Mampu	DINSOS	pmks.sarolangunkab.go.id	RUNNING
24	NMS OBSERVIUM	Aplikasi Monitoring Jaringan	DISKOMINFO	nms.sarolangunkab.go.id	RUNNING

NO	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI	PENGELOLA	SUB DOMAIN	STATUS
25	PPID	Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	DISKOMINFO	ppid.sarolangunkab.go.id	RUNNING
26	EMAIL KABUPATEN	Aplikasi Surat Elektronik Pemkab Sarolangun	DISKOMINFO	mxmail.sarolangunkab.go.id	RUNNING
27	E-LPPK	Laporan Pelaksanaan Program Kerja secara Elektronik	Bag. Pembangunan SETDA	elppk.sarolangunkab.go.id	RUNNING

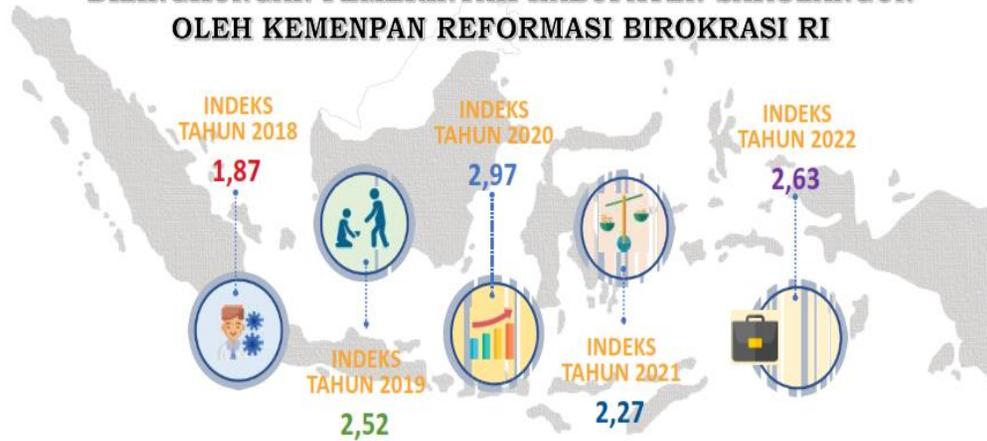
DAFTAR WEBSITE DAN SUBDOMAIN YANG DIMILIKI OPD KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA WEBSITE	DESKRIPSI	PENGELOLA	ALAMAT (URL)	STATUS
1	Website Kab. Sarolangun	Informasi dan Publikasi Kabupaten Sarolangun	Diskominfo	sarolangunkab.go.id	RUNNING
2	Website Diskominfo	Informasi seputar Dinas Kominfo	Diskominfo	diskominfo.sarolangunkab.go.id	MAINTENANCE
3	Website BAPPEDA	Informasi seputar BAPPEDA	BAPPEDA	bappeda.sarolangunkab.go.id	OFFLINE
4	Website BKPSDM	Informasi seputar Kepegawaian Sarolangun	BKPSDM	bkpsdm.sarolangunkab.go.id	RUNNING
5	Website Dinkes	Informasi seputar Dinas Kesehatan	DINKES	dinkes.sarolangunkab.go.id	RUNNING
6	Website DPMPTSP	Informasi seputar Perizinan	DPMPTSP	dpmptsp.sarolangunkab.go.id	RUNNING

NO	NAMA WEBSITE	DESKRIPSI	PENGELOLA	ALAMAT (URL)	STATUS
7	Website Disdikbud	Informasi seputar Kependidikan	Disdikbud	disdikbud.sarolangunkab.go.id	RUNNING
8	Website Kec. Air Hitam	Informasi Kecamatan Air Hitam	Kec. Air Hitam	airhitam.sarolangunkab.go.id	OFFLINE
9	Website Disdukcapil	Informasi layanan Disdukcapil	Disdukcapil	disdukcapil.sarolangunkab.go.id	RUNNING
10	Website Damkar	Informasi Dinas Damkar	Damkar	damkar.sarolangunkab.go.id	OFFLINE
11	Website BPPRD	Informasi BPPRD	BPPRD	bpprd.sarolangunkab.go.id	RUNNING
12	Website Disperkimtan	Informasi Disperkimtan	Disperkimtan	disperkimtan.sarolangunkab.go.id	RUNNING
13	Website Kec. Singkut	Informasi Kecamatan Singkut	Kec. Singkut	kecsingkut.sarolangunkab.go.id	OFFLINE
	Website Kel. Sarkam	Informasi Kelurahan Sarkam	Kel. Sarkam	sarkam.sarolangunkab.go.id	OFFLINE
14	Website Kel. Sei Benteng	Informasi Kelurahan Sei Benteng	Kel. Sei Benteng	seibenteng.sarolangunkab.go.id	OFFLINE
15	Website DPRD	Informasi DPRD Sarolangun	Sekretariat DPRD	dprd.sarolangunkab.go.id	RUNNING
16	Website DTPHP	Informasi Pertanian, Perkebunan, hortikultura Sarolangun	DTPHP	dprd.sarolangunkab.go.id	RUNNING
17	Website Diskopperindag	Informasi Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Diskopperindag	diskopperindag.sarolangunkab.go.id	OFFLINE



**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
OLEH KEMENPAN REFORMASI BIROKRASI RI**



2. Fasilitasi Internet/Intranet ke seluruh OPD.

Dalam rangka implementasi e-Government, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sarolangun telah memfasilitasi seluruh OPD dengan jaringan internet/intranet secara bertahap dengan menggunakan Kabel FO dan Radio Link sebagai media penghubung antara OPD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun akan terus berupaya dalam memberikan akses kepada seluruh OPD melalui jaringan internet/intranet yang mana dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun akan membangun fasilitas (infrastruktur) jaringan dengan menggunakan Kabel Fiber Optic (FO) dan Radio Link secara bertahap keseluruhan Kecamatan dan Kelurahan kurun waktu Tahun 2023-2026, sehingga nantinya seluruh OPD dan Satker dapat menggunakan akses internet/intranet yang cepat dan maksimal dalam melakukan proses administrasi Pemerintah, dengan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun mengharapkan dukungan dan sarannya dalam meningkatkan kualitas dan mutu teknologi yang telah dibangun.

OPD YANG TERKONEKSI JARINGAN INTERNET DAN INTRANET DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	NAMA OPD	KONDISI	JALUR	JUMLAH ACCESS POINT IN DOOR	Tahun Perolahan	KET
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Baik	Fiber Optik	5 Unit	2012, 2019	
2	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Baik	R. PEMANCAR	1 Unit	2012	Tower
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2019	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
4	DINAS KETAHANAN PANGAN	Baik	R. PEMANCAR	2 Unit	2012	Tower

NO	NAMA OPD	KONDISI	JALUR	JUMLAH ACCESS POINT IN DOOR	Tahun Perolahan	KET
5	SEKRETARIAT DAERAH	Baik	Fiber Optik	11 Unit	2012, 2019	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
6	SEKRETARIAT DPRD	Baik	Fiber Optik	5 Unit	2019	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Baik	Fiber Optik	2 Unit	2012, 2019	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
8	INSPEKTORAT	Baik	R. PEMANCAR	2 Unit	2012	Tower
9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Baik	R. PEMANCAR	1 Unit	2012	Tower
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2020	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
11	DINAS KOPERASI, UNKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2020	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2020	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
13	KANTOR KESBANGPOL	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2020	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
14	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2019	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2020	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2020	Kabel Fiber Optik

NO	NAMA OPD	KONDISI	JALUR	JUMLAH ACCESS POINT IN DOOR	Tahun Perolahan	KET
						1Core , 1 Switch
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Baik	R. PEMANCAR	1 Unit	2012	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2020	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
19	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Baik	R. PEMANCAR	1 Unit	2019	Tower
20	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Baik	R. PEMANCAR	2 Unit	2019	Tower
21	DINAS SOSIAL	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2020	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
22	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2020	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2020	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
24	DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2019	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
25	DINAS KESEHATAN	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2021	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
26	DINAS NAKERTRAN	Baik	R. PEMANCAR	1 Unit	2021	Tower
27	DINAS PERHUBUNGAN	Baik	R. PEMANCAR	1 Unit	2021	Tower

NO	NAMA OPD	KONDISI	JALUR	JUMLAH ACCESS POINT IN DOOR	Tahun Perolahan	KET
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Baik	R. PEMANCAR	1 Unit	2021	Tower
29	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2021	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch
30	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Baik	Fiber Optik	1 Unit	2021	Kabel Fiber Optik 1Core , 1 Switch

3. Fasilitas Wifi OPD.

Pada Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun telah membangun sarana internet/intranet menggunakan Wifi (Hotspot Area) keseluruh OPD secara bertahap sehingga selain menggunakan fasilitas internet/intranet dengan sarana Kabel (Local Area Network), internet/intranet juga dapat dengan mudah di akses secara Nirkabel (Wireless) dengan tujuan dapat memberikan layanan dalam memudahkan mengakses informasi.

1. Sumber Daya Penunjang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sarolangun.

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
1.	Meja Biro	8 Unit	Baik	APBD
2.	Meja ½ Biro	8 Unit	Baik	APBD
3.	Meja Kerja	5 Unit	Baik	APBD
4.	Meja Rapat	8 Unit	Baik	APBD
6.	Kursi Kerja	35 Unit	Baik	APBD
7.	Kursi Rapat	5 Unit	Baik	APBD
8.	Kursi Putar	18 Unit	Baik	APBD
9.	Gordyn	1 Paket	Baik	APBD
10.	Filling Kabinet	5 Unit	Baik	APBD
11.	Lemari Kaca	1 Unit	Baik	APBD
12.	Lemari Kayu	8 Unit	Baik	APBD
13.	UPS	1 Unit	Baik	APBD-P
14.	Tangga Aluminium	1 Unit	Baik	APBD
15.	Alat Panjat	1 Paket	Baik	APBD
16.	Papan Pengumuman	1 Unit	Baik	APBD

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
17.	Penyemprot Rumput	1 Unit	Baik	APBD
18.	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Baik	APBD
19.	Komputer PC	7 Unit	Baik	APBD
20.	Laptop	7 Unit	Baik	APBD
21.	Scanner	2 Unit	Baik	APBD
22.	Printer	1 Unit	Baik	APBD
23.	Tiang Antena Monopole	16 Unit	Baik	APBD
24.	Genset	1 Unit	Baik	APBD
25.	AC Split	8 Unit	Baik	APBD
26.	Rak Tv	1 Unit	Baik	APBD
27.	TV LED	1 Unit	Baik	APBD
28.	CCTV	1 Paket	Baik	APBD
29.	Kamera	2 Unit	Baik	APBD
30.	Komputer 3 in 1	3 Unit	Baik	APBD
31.	TV Tabung	1 Unit	Baik	APBD
33.	Server	5 Unit	Baik	APBD
34.	Monitor	1 Unit	Baik	APBD
35.	Mesin Absen	1 Unit	Baik	APBD
36.	Handkey	2 Unit	Baik	APBD
38.	Router Indoor & Outdoor	8 Unit	Baik	APBD
39.	Facimille	1 Unit	Baik	APBD
40.	Router	35 Unit	Baik	APBD
43.	Switch Hub	12 Unit	Baik	APBD
45.	Stabilisator	1 Unit	Baik	APBD
46.	Translator	4 Unit	Baik	APBD
47.	Tower Air	1 Unit	Baik	APBD
48.	Kendaraan dinas Roda 4	1 Unit	Baik	APBD
49.	Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	Baik	APBD

2. **Institusi Ex-Officio Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.**

- **Government Chief Information Officer (GCIO)** Daerah adalah Kepala dinas Komunikasi dan Informatika yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan fungsi yang tertera dalam pasal 64 Permenkominfo No. 8 Tahun 2019;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sarolangun.

2.3 **Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo.**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan komunikasi dan informatika sehingga penyelenggaraan pemerintah transparan dan akuntabel sesuai

keterbukaan era reformasi dalam upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak public yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun. Berikut program yang telah dilaksanakan Diskominfo pada TA. 2017-2022:

Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Jaringan Tower dalam kondisi baik.					65%	-	-	-		47%	-	-	-	-	72%	-	-	-
2	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan					65%	-	-	-		47%	-	-	-	-	72%	-	-	-
3	Persentase OPD yang terkoneksi Jaringan Internet				55%-	-	75%	-	-	47%	-	68%	-	-	85%	-	91%	-	-
4	Aplikasi Berbasis Website yang bisa diakses OPD				55	-	90	-	-	47	-	90	-	-	85%	-	100%	-	-
5	Jumlah Kunjungan Website				-	-	4.500	-	-	-	-	30.028	-	-	-	-	667%	-	-
6	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				-	-	50%	-	-	-	-	45%	-	-	-	-	90%	-	-
7	Indeks SPBE				-	-	-	2,61	2,65	-	-	-	2,27	2,63 (Baik)	-	-	-	87%	99%
8	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan				-	-	-	75%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	133%	100%
9	Persentase Statistik Sektoral				-	-	-	50%	60%	-	-	-	62%	97%	-	-	-	124%	162%
10	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)				-	-	-	180 Point	200 Point	-	-	-	199 Point	240 Point	-	-	-	111%	120%

Tabel T-C 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Sarolangun

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.554.629.000	1.763.464.000	1.566.264.200	-	-	1.503.678.311	1.716.430.968	1.555.905.957	-	-	97	97	99	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	282.785.000	870.500.000	401.000.000	-	-	272.740.100	818.599.700	400.130.100	-	-	96	94	100	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur.	40.000.000	42.000.000	20.604.000	-	-	39.891.000	41.970.000	20.602.000	-	-	100	100	100	-	-	-	-
Program Peningkatan dan pengembangan promosi daerah	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	15.000.000	15.000.000	6.800.000	-	-	15.000.000	14.957.500	6.800.000	-	-	100	100	100	-	-	-	-
Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	50.000.000	50.000.000	-	-	-	49.633.000	47.061.000	-	-	-	99	94	-	-	-	-	-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	40.000.000	40.000.000	3.860.000	-	-	29.682.000	39.400.000	3.860.000	-	-	74	99	100	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Informasi dan Komunikasi																	
Program Fasilitas Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan dan Pembangunan Layanan e-Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	50.000.000	80.000.000	168.060.000	-	-	49.885.000	79.970.000	165.027.500	-	-	100	100	98	-	-	-	-
Program Pengembangan Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Masa	42.500.000	105.000.000	59.497.000	-	-	40.563.000	100.554.000	58.640.200	-	-	95	96	99	-	-	-	-
Program Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian	165.000.000	165.000.000	48.400.000	-	-	120.366.500	135.142.000	48.400.000	-	-	73	82	100	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	57.500.000	11.500.000	5.780.000	-	-	54.695.000	10.485.000	5.780.000	-	-	95	91	100	-	-	-	-
Program Penunjang	-	-	-	4.730.086.990	5.580.835.631	-	-	-	4.148.136.167	5.241.808.132	-	-	-	88	94	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota																	
Program Komunikasi dan Informasi Publik	-	-	-	551.761.640	974.468.060	-	-	-	397.546.057	941.736.511	-	-	-	72	97	-	-
Program Aplikasi Informatika	-	-	-	811.019.200	229.585.600	-	-	-	789.416.200	227.825.800	-	-	-	97	99	-	-
Ptogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	22.408.500	31.798.000	-	-	-	21.429.500	31.698.000	-	-	-	96	100	-	-
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	-	-	93.761.750	71.887.500	-	-	-	87.753.750	71.837.500	-	-	-	94	100	-	-

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal dan eksternal.

Identifikasi atas kondisi internal dan eksternal organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan organisasi.

Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan akan pelayanan peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, baik untuk OPD pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sarolangun pada umumnya diantaranya :

- Jaringan wifi corner gratis di beberapa titik
- Jaringan komunikasi data terpadu yang menjangkau 11 Kecamatan dan 9 Kelurahan dan 140 Desa
- Pembangunan Jaringan Komunikasi data diseluruh SKPD
- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Internal Pemerintah dan Layanan Masyarakat
- Pembangunan Data Center (Pusat Server Pemerintah Kabupaten) dan
- Pembangunan Command Center
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Sandi, Informasi dan Publikasi
- Penyajian Kualitas Data Statistik Sektor

Analisis lingkungan internal dan eksternal dengan memperhatikan unsur-unsur tantangan dan peluang sebagai berikut :

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dapat disajikan dalam table sebagai berikut :

No	Tantangan	Peluang
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik (e-government).	Perpres 95 Tahun 2019 Tentang SPBE
2.	Kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi publik	UUD RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Belum Optimalnya Penyajian Data Sektoral dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
4.	Terbatasnya SDM Pengelola Pengamanan Informasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sandi	Peraturan BSSN No 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi diPemerintah Daerah

BAB - III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh factor internal maupun eksternal, factor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau berasal dari dalam OPD, sedangkan factor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Lembaga atau instansi diluar organisasi yang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru,

Berikut adalah identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 4 (empat) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

Tabel berikut menampilkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun yang dikelompokkan menurut pembagian urusan yang diselenggarakan.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan	Permasalahan
1	Program Informasi dan Pelayanan Publik	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Beberapa program Pemerintah Kota belum terinformasi atau tersosialisasikan kepada masyarakat secara optimal

No	Program/Kegiatan	Permasalahan
		Masih rendahnya kesadaran OPD dalam pengelolaan informasi melalui kanal digital yang ada
		Masih kurangnya respon OPD dalam menanggapi aduan Masyarakat
2	Program Aplikasi Informatika	
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masih adanya nama domain yang tidak merepresentasikan konten atau layanan yang disediakan
		Belum terpenuhinya secara menyeluruh perangkat jaringan yang sesuai dengan standar jaringan komputer organisasi berskala besar (enterprise)
		Pengelolaan aset infrastruktur belum dilaksanakan dengan baik
		Belum tersedianya dokumen pengelolaan infrastruktur yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional
	Kegiatan Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Proses bisnis dan data yang belum terintegrasi antar OPD
		Regulasi layanan informasi berbasis digital masih kurang
		Beberapa OPD yang tidak memiliki pengembangan sistem melaksanakan pengembangan sistem tanpa melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo
		Pengembangan aplikasi masih menitikberatkan pada aplikasi operasional bukan pada aplikasi data analitik atau Decision Support System (DSS)
		Pengembangan sistem sebagai pendukung keputusan belum optimal
		Tidak berimbangnya antara kebutuhan pengembangan sistem dengan ketersediaan sumber daya (anggaran dan SDM)
		Banyaknya permintaan OPD yang belum tercantum dalam roadmap SPBE maupun smart city
		Belum tersedianya standarisasi dokumen pendukung implementasi SPBE
		Kebijakan pemerintah pusat untuk mewajibkan untuk memanfaatkan pusat data nasional

No	Program/Kegiatan	Permasalahan
		<p>Kewajiban daerah untuk menerapkan standardisasi pusat data yang dimiliki sesuai dengan SNI</p> <p>Kebijakan pemerintah pusat untuk penggunaan aplikasi generik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya informasi terkait renovasi atau perbaikan gedung milik Pemerintah Kab.Sarolangun berkaitan dengan ketersediaan jaringan telpon dan internet di dalam gedung - Kurangnya komitmen penanggung jawab pelaksana renovasi gedung berkaitan dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan <p>Belum adanya cross program dalam Pemerintah Kab untuk penguatan ekosistem digital</p> <p>Penataan infrastruktur pasif di Kab.Sarolangun belum optimal</p>
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<p>Belum adanya pedoman dalam verifikasi data oleh wali data</p> <p>Belum adanya kebijakan yang jelas terkait semua data dari OPD harus melalui atau sepengetahuan wali data sebelum dikirim ke Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga</p> <p>Belum adanya kebijakan mengenai SOP pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data</p> <p>Standarisasi data dan tipe data yang belum lengkap</p> <p>Belum adanya regulasi sebagai dasar pelaksanaan Perpres satu data di Kab.Sarolangun</p> <p>Masih kurangnya kesadaran OPD dalam pengelolaan data</p> <p>Kompetensi SDM dalam pengelolaan big data perlu ditingkatkan</p>
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<p>Ditariknya peralatan kontra penginderaan oleh BSSN</p> <p>Belum adanya regulasi terkait manajemen resiko keamanan informasi</p> <p>Belum adanya regulasi terkait audit internal keamanan TI</p>

No	Program/Kegiatan	Permasalahan
		Belum adanya personil yang menguasai data science
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Kurangnya kesadaran keamanan informasi bagi personil JKS di Pemkot Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Belum terbentuknya FORKOMSANDA di Kabupaten Sarolangun

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi serta Renstra Kabupaten.

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020—2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional.

Visi Kemenkominfo

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala

Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Misi Kemenkominfo

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2,3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Kemenkominfo

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital

nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand). Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020-2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Tabel III.1 Arah Kebijakan dan Strategi 2020-2024

No	Arah Kebijakan Strategi	Strategi
I.	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan public	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividend; dan 3. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
II	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
III	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor- sektor ekonomi dan bisnis
IV	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
V	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

VI	Melakukan orkestrasi komunikasi public melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
VII	Meningkatkan kualitas manajemen internal	1. Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan smart services, dan inovasi perencanaan penganggaran.

Dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan dan strategi di atas, Kemenkominfo menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai melalui 5 (lima) program yaitu sebagai berikut :

Tabel III Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo

No	Sasaran	Program
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan Terjangkau	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran Digital	
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	
4	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional	
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan Bisnis	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital dan Komunikasi	
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	

9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Program Komunikasi Publik
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Dukungan Manajemen

3.2.2 Telaahan Renstra Kominfo Provinsi Jambi

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memberikan amanat bahwa perencanaan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Misi :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.

2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi berkewajiban untuk mensukseskan

Misi Ke 1 : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan

yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi, dan

Misi ke -2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah

yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3.2.3 Telaahan Renstra Diskominfo Kabupaten Sarolangun

Sedangkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik,**

bersih, transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat dengan pelayanan publik yang handal” dengan sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel”

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Perlu diketahui bahwa aspek rencana tata ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang maju dan sejahtera berbasis sektor perkebunan, pertanian dan pertambangan yang berwawasan lingkungan .

Terbentuknya struktur ruang dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung dan mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya. Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RT/ RW Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 - 2034, Kabupaten Sarolangun.

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem Komunikasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis Komunikasi secara baik dengan efisien dan efektif
2. Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dengan integrasi wilayah .

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan smart city di Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
2. Optimalisasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Implementasi data driven-government;
4. Standarisasi pusat data Pemerintah Kab.Sarolangun;
5. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kab. Sarolangun;
6. Pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif perangkat telekomunikasi
7. Penguatan keamanan data dan informasi Pemerintah Kab.Sarolangun;
8. Pengembangan ekosistem digital di Kab.Sarolangun;
9. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat;
10. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
11. Pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Sarolangun yang menguasai teknologi informasi;

BAB - IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 tidak mendasarkan kepada visi dan misi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026 tetap mengacu pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2025; Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap Keempat; dan Isu Strategis Aktual. Sehingga Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun yang akan dicapai ditahun mendatang dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun yang digambarkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Sarolangun Tahun 2023-2026

No	Sasaran RPD	Indikat or Sasaran	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
								Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan layanan Publik berbasis Elektronik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Predikat SAKIP	B	BB	BB	BB	BB
				Indeks SPBE	2,63	Meningkatkan layanan informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	89,33	89,33	89,33	89,33	89,33
						Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD	Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah Daerah	71	72	73	74	74
							Persentase Pengelolaan SPBE	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
						Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50	60	70	75	75
							Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	50	60	70	75	75
							Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks KAMI	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi

BAB - V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis. Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran ketiga Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat dengan pelayanan publik yang handal	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan layanan Publik berbasis Elektronik	Meningkatkan layanan informasi Publik	Peningkatan Komunikasi Publik	Melaksanakan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Program Informasi dan Komunikasi Publik
					Melaksanakan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Tersedianya Layanan Hubungan Media	
					Menyediakan Pelayanan Informasi Publik dan meningkatnya kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	
			Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD	Peningkatan akses terhadap layanan system informasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Penyediaan infrastruktur akses Jaringan dan layanan Aplikasi Sistem Informasi Elektronik (SPBE)	Program Aplikasi In formatika
				Meningkatnya pemanfaatan aplikasi teknologi informasi	Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
					Melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	
				Meningkatnya layanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas Melaksanakan Penyelenggaran Sistem Penghubung layanan pemerintah	
			Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi	Optimalisasi penghimpunan data statistic sectoral dari stakeholder	Penyediaan data statistic sectoral untuk perencanaan dan monitoring evaluasi Pembangunan	Program Penyelenggaraan Statistik Sectoral
			Meningkatnya keamanan informasi daerah	Meningkatnya layanan persandian untuk pengamanan informasi Meningkatnya Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Berbasis Elektronik Menyediakan Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Melaksanakan Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dari penetapan tujuan, strategi, arah kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun menetapkan program dan kegiatan dan sub kegiatan mulai dari Permendagri 86 Tahun 2017, Permendagri 90 Tahun 2019 dan terakhir berdasarkan program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dimutakhirkan berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021.

Adapun program kegiatan yang menjadi urusan penunjang dan urusan wajib Diskominfo untuk tahun 2023-2026 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
5. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Dari Program tersebut di atas diuraikan kegiatan yang direncanakan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel 6.1 berikut ini:

TABEL 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2023-2026 BERDASARKAN PERMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021**

Tujuan	Sasaran	KODE				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi			
		Target	Anggaran	Target	Anggaran				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan layanan Publik berbasis Elektronik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		2	1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														Rp. 11.367.079.240,-			
		2	1	0	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP	A	B	Rp. 5.486.397.000,-	BB	Rp. 8.134.294.020,-	BB	Rp. 7.272.353.660,-	BB	Rp. 6.958.275.240,-	BB		Bidang Sekretariat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun		
		2	1	0	6	1	2	0	1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Rp. 110.000.000,-	-	Rp. 110.000.000,-	-	Rp. 110.000.000,-	Rp. 110.000.000,-	Rp. 110.000.000,-				
		2	1	0	6	1	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen (Renstra, RKA/RKA-P)	2 Dokumen (RKA/RK A-P)	Rp. 30.000.000,-	3 Dokumen (Renstra, RKA/RKA-P)	Rp. 30.000.000,-	2 Dokumen (RKA/RK A-P)	Rp. 30.000.000,-	2 Dokumen (RKA/RK A-P)	Rp. 30.000.000,-			
		2	1	0	6	1	2	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan (LPPD.LA KIP/SAKI P DAN LKPJ)	3 Laporan (LPPD.LA KIP/SAKI P DAN LKPJ)	Rp. 50.000.000,-	3 Laporan (LPPD.LA KIP/SAKI P DAN LKPJ)	Rp. 50.000.000,-	3 Laporan (LPPD.LA KIP/SAKI P DAN LKPJ)	Rp. 50.000.000,-	3 Laporan (LPPD.LA KIP/SAKI P DAN LKPJ)	Rp. 50.000.000,-			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target				Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
		2	1	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan (Evaluasi Renja, LKPI)	Rp. 30.000.000,-	2 Laporan (Evaluasi Renja, LKPI)	Rp. 30.000.000,-	2 Laporan (Evaluasi Renja, LKPI)	Rp. 30.000.000,-	2 Laporan (Evaluasi Renja, LKPI)	Rp. 30.000.000,-	2 Laporan (Evaluasi Renja, LKPI)	Rp. 30.000.000,-			
		2	1	0	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan daerah		Rp. 3.758.420.000,-		Rp. 4.126.841.000,-		Rp. 4.522.341.000,-		Rp. 4.956.891.000,-		Rp. 4.956.891.000,-			
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	Rp. 3.550.000.000,-	35 Orang/Bulan	Rp. 3.905.000.000,-	40 Orang/Bulan	Rp. 4.295.500.000,-	45 Orang/Bulan	Rp. 4.725.050.000,-	45 Orang/Bulan	Rp. 4.725.050.000,-			
						0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp. 168.420.000,-	12 Dokumen	Rp. 176.841.000,-									
		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	Rp. 10.000.000,-	4 Dokumen	Rp. 15.000.000,-	4 Dokumen	Rp. 20.000.000,-	4 Dokumen	Rp. 25.000.000,-	4 Dokumen	Rp. 25.000.000,-			
		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp. 30.000.000,-	1 Laporan	Rp. 30.000.000,-	1 Laporan	Rp. 30.000.000,-	1 Laporan	Rp. 30.000.000,-	1 Laporan	Rp. 30.000.000,-			
		2	1	0	2.	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	Rp. 10.000.000,-		Rp. 10.000.000,-		Rp. 10.000.000,-		Rp. 10.000.000,-		Rp. 10.000.000,-			
		2	1	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp. 10.000.000,-	1 Laporan	Rp. 10.000.000,-	1 Laporan	Rp. 10.000.000,-	1 Laporan	Rp. 10.000.000,-	1 Laporan	Rp. 10.000.000,-			
		2	1	0	2.	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah	N/A	Rp. 60.000.000,-		Rp. 60.000.000,-		Rp. 60.000.000,-		Rp. 60.000.000,-		Rp. 60.000.000,-			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penangu ng jawab	Lokasi
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
							Perangkat Daerah	Kewenangan Perangkat Daerah													
		2	1	0	2	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	Rp. 60.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 60.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 60.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 60.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 60.000.000,-		
		2	1	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	35%	Rp. 125.422.000,-	40%	Rp. 146.450.000,-	40%	Rp. 144.150.000,-	40%	Rp. 144.150.000,-	40%	Rp. 144.150.000,-		
		2	1	0	2	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	-	Rp. 0-	46 Unit	Rp. 2.300.000,-	-	Rp. 0-	-	Rp. 0-	-	Rp. 0-		
		2	1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	46 Paket	Rp. 29.900.000,-	46 Paket	Rp. 29.900.000,-	46 Paket	Rp. 29.900.000,-	46 Paket	Rp. 29.900.000,-	46 Paket	Rp. 29.900.000,-		
		2	1	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1 Dokuemn	Rp. 10.964.000	1 Dokuemn	Rp. 10.964.000	1 Dokuemn	Rp. 10.964.000	1 Dokuemn	Rp. 10.964.000	1 Dokuemn	Rp. 10.964.000		
		2	1	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	1 Orang Diklatpim 2	Rp. 60.522.000,-	1 Orang Diklatpim3	Rp. 44.250.000,-	1 Orang Diklatpim3	Rp. 44.250.000,-	1 Orang Diklatpim3	Rp. 44.250.000,-	1 Orang Diklatpim3	Rp. 44.250.000,-		
		2	1	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	31 Orang	Rp. 35.000.000,-	31 Orang	Rp. 35.000.000,-	31 Orang	Rp. 35.000.000,-	31 Orang	Rp. 35.000.000,-	31 Orang	Rp. 35.000.000,-		
		2	1	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	-	Rp. 0-	31 Orang	Rp. 35.000.000,-	31 Orang	Rp. 35.000.000,-	31 Orang	Rp. 35.000.000,-	31 Orang	Rp. 35.000.000,-		

Tujuan	Sasaran	KODE				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi
									Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		2	1	0	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	70%	Rp. 351.800.0 00,-	75%	Rp. 432.800.00 0,-	75%	Rp. 428.800.00 0,-	75%	Rp. 464.800.00 0,-	75%	Rp. 464.800.00 0,-		
		2	1	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 6.000.000, -	1 Paket	Rp. 7.000.000,-	1 Paket	Rp. 8.000.000,-	1 Paket	Rp. 9.000.000,-	1 Paket	Rp. 9.000.000, -		
		2	1	0	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	-	Rp. 0-	1 Paket	Rp. 40.000.000 ,-	-	Rp. 0-	-	Rp. 0-	-	Rp. 0-		
		2	1	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 60.000.00 0,-	1 Paket	Rp. 70.000.000 ,-	1 Paket	Rp. 80.000.000, -	1 Paket	Rp. 90.000.000 ,-	1 Paket	Rp. 90.000.00 0,-		
		2	1	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	Rp. 20.000.00 0,-	2 Paket	Rp. 25.000.000 ,-	2 Paket	Rp. 30.000.000, -	2 Paket	Rp. 35.000.000 ,-	2 Paket	Rp. 35.000.00 0,-		
		2	1	0	2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- undangan	10 Dokumen	-	Rp. 0,-	10 Dokumen	Rp. 5.000.000,-	10 Dokumen	Rp. 5.000.000,-	10 Dokumen	Rp. 5.000.000,-	10 Dokumen	Rp. 5.000.000, -		
		2	1	0	2.	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamuh	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 25.000.00 0,-	12 Laporan	Rp. 25.000.000 ,-	12 Laporan	Rp. 25.000.000, -	12 Laporan	Rp. 25.000.000 ,-	12 Laporan	Rp. 25.000.00 0,-		
		2	1	0	2.	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 200.000.0 00,-	12 Laporan	Rp. 220.000.00 0,-	12 Laporan	Rp. 240.000.00 0,-	12 Laporan	Rp. 260.000.00 0,-	12 Laporan	Rp. 260.000.0 00,-		
		2	1	0	2.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp. 40.800.00 0,-	10 Dokumen	Rp. 40.800.000 ,-	10 Dokumen	Rp. 40.800.000, -	10 Dokumen	Rp. 40.800.000 ,-	10 Dokumen	Rp. 40.800.00 0,-		
		2	1	0	2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah barang Milik daerah yang dikelola		-	Rp. 267.899.7 80,-	-	Rp. 2.474.797. 720,-	-	Rp. 1.213.657.3 60,-	-	Rp. 409.028.94 0,-	-	Rp. 409.028.9 40,-		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
							Urusan Pemerintah Daerah														
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang disediakan	2 Unit	-	-	2 Unit	Rp. 60.292.000 ,-	2 Unit	Rp. 472.230.00 0,-	2 Unit	Rp. 60.292.000 ,-	2 Unit	Rp. 60.292.00 0,-		
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	Rp. 71.860.00 0,-	-	-	2 Unit	Rp. 71.860.000, -	2 Unit	Rp. 71.860.000 ,-	2 Unit	Rp. 71.860.00 0,-		
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang diadakan	Unit	2 unit Meja Rapat, 50 unit Kursi rapat	Rp. 41.639.78 0,-	10 Unit Meja dan Kursi Kerja	Rp. 27.255.720 ,-	10 Unit Meja dan Kursi Kerja	Rp. 27.255.720, -	1 Unit Lemari Arsip	Rp. 34.565.300 ,-	1 Unit Lemari Arsip	Rp. 34.565.30 0,-		
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Unit	2 unit AC 2 PK	Rp. 14.400.00 0,-	1 Unit AC Standing 5 PK	Rp. 40.000.000 ,-	1 Unit AC ½ PK	Rp. 12.311.640, -	1 Unit AC ½ PK	Rp. 12.311.640 ,-	1 Unit AC ½ PK	Rp. 12.311.64 0,-		
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit	1 Unit PC	Rp. 15.000.00 0,-	-	-	2 Unit PC	Rp. 30.000.000, -	2 Unit PC	Rp. 30.000.000 ,-	2 Unit PC	Rp. 30.000.00 0,-		
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	-	-	1 Unit (Gedung Pusat Data)	Rp. 1.565.250. 000,-	1 Unit (Kamar Sandi)	Rp. 200.000.00 0,-	1 Unit	Rp. 200.000.00 0,-	1 Unit	Rp. 200.000.0 00,-		
		2	1	0	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1 Unit (Tempat Parkir)	Rp. 60.000.00 0,-	1 Unit (Sistem Kelistrikan, 1 Unit Pendingin Gedung, 1 Unit Jaringan Data, 1 Unit Sistem Kebakaran Gedung, 1 Unit Sistem Monitoring Lingkungan, dan 1 Unit Sistem Keamanan	Rp. 7.802.000. 000,-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
											Fisik Pusat Data dan Pusat Pengendali an dan Jaringan Intra)										
		2	1	0	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1 Unit Sarana Disabilitas	Rp. 50.000.00 0,-	-	-	1 Unit Musholla	Rp. 400.000.00 0,-	-	-	-	-		
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	Rp. 563.000.0 00,-	-	Rp. 533.550.00 0,-	-	Rp. 543.550.00 0,-	-	Rp. 553.550.00 0,-	-	Rp. 553.550.0 00,-		
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	Rp. 5.500.000, -	1 Laporan	Rp. 5.775.000,-	1 Laporan	Rp. 5.775.000,-	1 Laporan	Rp. 5.775.000,-	1 Laporan	Rp. 5.775.000, -		
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12 Laporan	Rp. 360.000.0 00,-	12 Laporan	Rp. 330.000.00 0,-	12 Laporan	Rp. 340.000.00 0,-	12 Laporan	Rp. 350.000.00 0,-	12 Laporan	Rp. 350.000.0 00,-		
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1 Laporan	Rp. 5.500.000, -	1 Laporan	Rp. 5.775.000,-	1 Laporan	Rp. 5.775.000,-	1 Laporan	Rp. 5.775.000,-	1 Laporan	Rp. 5.775.000, -		
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12 Laporan	Rp. 192.000.0 00,-	12 Laporan	Rp. 192.000.00 0,-	12 Laporan	Rp. 192.000.00 0,-	12 Laporan	Rp. 192.000.00 0,-	12 Laporan	Rp. 192.000.0 00,-		
		2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara		-	Rp. 239.855.3 00,-	-	Rp. 239.855.30 0,-	-	Rp. 239.855.30 0,-	-	Rp. 239.855.30 0,-	-	Rp. 239.855.3 00,-		

Tujuan	Sasaran	KODE				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit (Innova Eselon II)	Rp. 29.500.000,-	1 Unit (Innova Eselon II)	Rp. 29.500.000,-	1 Unit (Innova Eselon II)	Rp. 29.500.000,-	1 Unit (Innova Eselon II)	Rp. 29.500.000,-				
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	8 Unit	Rp. 60.000.000,-										
		2	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yg terpelihara	62 Unit	62 Unit	Rp. 88.400.000,-										
		2	1	0	2	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Rp. 61.955.300,-										
		2	1	0	2	1	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	Rp. 5.000.000,-	1 Unit	Rp. 5.000.000,-			
		2	1	0	2	1	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	Rp. 5.000.000,-	1 Unit	Rp. 5.000.000,-			
	Meningkatkan layanan inform	2	1	0			PROGRAM PENGLOLAAN INFORMASI DAN	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan		-	Rp. 1.190.448.000,-	-	Rp. 1.251.706.750,-	-	Rp. 1.331.800.000,-	-	Rp. 1.406.800.000,-	-	Rp. 1.406.800.000,-	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng Jawab	Lokasi
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target				Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
	asi Publik						KOMUNIKAS I PUBLIK														
		2	1 6	0 2	2. 0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	Rp. 1.190.448. 000,-	-	Rp. 1.251.706. 750,-	-	Rp. 1.331.800.0 00,-	-	Rp. 1.406.800. 000,-	-	Rp. 1.406.800. 000,-		
		2	1 6	0 2	2. 0 1	0 1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen (SP4N)	Rp. 5.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 5.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 5.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 5.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 5.000.000, -		
		2	1 6	0 2	2. 0 1	0 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 15.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 25.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 35.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 45.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 45.000.00 0,-		
		2	1 6	0 2	2. 0 1	0 3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp. 50.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 50.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 50.000.00 0,-		
		2	1 6	0 2	2. 0 1	0 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Layanan Perencanaan Media komunikasi publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 40.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 50.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 60.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 70.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 70.000.00 0,-		
		2	1 6	0 2	2. 0 1	0 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 61.800.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 61.800.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 61.800.000, -	1 Dokumen	Rp. 61.800.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 61.800.00 0,-		
		2	1 6	0 2	2. 0 1	0 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 60.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 60.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 60.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 60.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 60.000.00 0,-		
		2	1 6	0 2	2. 0 1	0 7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	5 Layanan	Rp. 850.000.0 00,-	5 Layanan	Rp. 900.000.00 0,-	5 Layanan	Rp. 950.000.00 0,-	5 Layanan	Rp. 1.000.000. 000,-	5 Layanan	Rp. 1.000.000. 000,-		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi
		2	1	0	2	0	8				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		2	1	0	2	0	8	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 30.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 35.000.000 -	1 Dokumen	Rp. 40.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 45.000.000 -	1 Dokumen	Rp. 45.000.00 0,-		
		2	1	0	2	0	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	N/A	1 Dokumen	Rp. 20.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 20.000.000 -	1 Dokumen	Rp. 20.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 20.000.000 -	1 Dokumen	Rp. 20.000.00 0,-		
		2	1	0	2	0	0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	31 Orang	31 Orang	Rp. 35.000.00 0,-	20 Orang	Rp. 25.000.000 -	20 Orang	Rp. 25.000.000, -	20 Orang	Rp. 25.000.000 -	20 Orang	Rp. 25.000.00 0,-		
		2	1	0	2	0	1	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	N/A	1 Dokumen	Rp. 10.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 15.000.000 -	1 Dokumen	Rp. 15.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 15.000.000 -	1 Dokumen	Rp. 15.000.00 0,-		
		2	1	0	2	0	2	Penyelenggara an Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	N/A	1 Dokumen	Rp. 10.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 10.000.000 -	1 Dokumen	Rp. 10.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 10.000.000 -	1 Dokumen	Rp. 10.000.00 0,-		
		2	1	0	2	0	3	Penyediaan/Pen gadaan Sarana dan Prasarana pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	12 Unit	4 Unit (Voice Recorder, Lensa Wide dan Lensa Tele, Flash	Rp. 53.648.00 0,-	3 unit (mix untuk Saiaran Radio) dan 1 PC	Rp. 44.906.750 -	-	-	-	-	-	-		
	Menin gkatny a Imple mentas i Sistem Pemer intahan Berbas is Elektr onik (SPBE	2	1	0				PROGRAM PENGELOLA AN APLIKASI INFORMATIK A	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika		-	Rp. 2.350.400. 000,-	-	Rp. 2.368.704. 000,-	-	Rp. 2.336.704.0 00,-	-	Rp. 2.402.204. 000,-	-	Rp. 2.402.204. 000,-	Bidang TIK & e- Gov	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
) pada PD																	
		2 6 3	0 3 1	2. 0 1		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di LingkupPemerint ah Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di LingkupPemerint ah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	40%	Rp. 1.577.000. 000,-	-	Rp. 1.445.054. 000,-	-	Rp. 1.450.054.0 00,-	-	Rp. 1.450.054. 000,-		
		2 6 3	0 3 1	2. 0 1	0 1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah kabupaten/kota	2 Domain	2 Domain	Rp. 10.000.00 0,-	2 Domain	Rp. 15.000.000 ,-	2 Domain	Rp. 20.000.000, -	2 Domain	Rp. 25.000.000 ,-		
		2 6 3	0 3 1	2. 0 1	0 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	1 Domain	1 Domain	Rp. 7.000.000, -	1 Domain	Rp. 7.000.000,-	1 Domain	Rp. 7.000.000,-	1 Domain	Rp. 7.000.000, -		
		2 6 3	0 3 1	2. 0 1	0 3	Penyelenggaraa n Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 Unit	5 Unit	Rp. 1.560.000. 000,-	5 Unit	Rp. 1.423.054. 000,-	5 Unit	Rp. 1.423.054.0 00,-	5 Unit	Rp. 1.423.054. 000,-		
		2 6 3	0 3 2	2. 0 2		Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Penerapan e- Government di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota		45%	Rp. 773.400.0 00,-	47%	Rp. 923.650.00 0,-	47%	Rp. 886.650.00 0,-	47%	Rp. 947.150.00 0,-		
		2 6 3	0 3 2	2. 0 2	0 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 75.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 75.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 75.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 75.000.000 ,-		

Tujuan	Sasaran	KODE				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
		2	1	0	2	0	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen perencanaan Detail Engineering Design (DED) spesifikasi teknis Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) sesuai SNI 899-1:2019	Rp. 102.500.0 0,-	1 Dokumen Survey Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna layanan Publik SPBE	Rp. 76.500.000 ,-	1 Dokumen Audit TIK	Rp. 39.500.000, -	1 Dokumen	Rp. 100.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 100.000.0 0,-		
		2	1	0	2	0	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat data Pemerintahan daerah yang dikelola	N/A	-	1 Unit	Rp. 135.750.00 0,-	1 Unit	Rp. 135.750.00 0,-	1 Unit	Rp. 135.750.00 0,-	1 Unit	Rp. 135.750.0 0,-			
		2	1	0	2	0	Penyelenggara an Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	N/A	1 Dokumen	Rp. 50.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 50.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 50.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 50.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 50.000.00 0,-		
		2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 55.900.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 55.900.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 55.900.000, -	1 Dokumen	Rp. 55.900.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 55.900.00 0,-		
		2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Data Informasi Elektronik	N/A	31 Perangkat Daerah	Rp. 30.000.00 0,-	51 Perangkat Daerah	Rp. 55.000.000 ,-	51 Perangkat Daerah	Rp. 55.000.000, -	51 Perangkat Daerah	Rp. 55.000.000 ,-	51 Perangkat Daerah	Rp. 55.000.00 0,-		
		2	1	0	2	0	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	1 Unit	1 Unit	Rp. 30.000.00 0,-	1 Unit	Rp. 75.500.000 ,-	1 Unit	Rp. 75.500.000, -	1 Unit	Rp. 75.500.000 ,-	1 Unit	Rp. 75.500.00 0,-		

Tujuan	Sasaran	KODE				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawab	Lokasi			
		Target	Anggaran	Target	Anggaran				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
		2	1	0	2	0	0	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	Layanan	Rp. 50.000.000,-	Layanan	Rp. 50.000.000,-	Layanan	Rp. 50.000.000,-	Layanan	Rp. 50.000.000,-				
		2	1	0	2	0	9	2	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	N/A	1 Dokumen	Rp. 50.000.000,-	1 Dokumen (Masterplan Smart City)	Rp. 150.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 100.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 100.000.000,-				
		2	1	0	2	1	0	0	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM TIK yang direkrut	N/A	1 Dokumen	Rp. 150.000.000,-	1 Dokumen (Gaji Tenaga Ahli 2 Orang Programer)	Rp. 120.000.000,-	1 Dokumen (Gaji Tenaga Ahli 2 Orang Programer)	Rp. 120.000.000,-	1 Dokumen (Gaji Tenaga Ahli 2 Orang Programer)	Rp. 120.000.000,-				
		2	1	0	2	1	1	2	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	N/A	1 Dokumen	Rp. 30.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 30.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 30.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 30.000.000,-				
		2	1	0	2	1	2	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Tahun	1 Dokumen	Rp. 150.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 150.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 150.000.000,-	1 Dokumen	Rp. 150.000.000,-				
		2	2	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			-	Rp. 500.000.000,-	-	Rp. 440.000.000,-	-	Rp. 440.000.000,-	-	Rp. 440.000.000,-				
	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral dan terintegrasi	2	2	0					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	62%	65%	Rp. 500.000.000,-	70%	Rp. 440.000.000,-	75%	Rp. 440.000.000,-	80%	Rp. 440.000.000,-	80%	Rp. 440.000.000,-	Bidang Statistik Sektoral	
		2	2	0	2	1			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup	Persentase Penyelenggaraan Statistik di		65%	Rp. 500.000.000,-	70%	Rp. 440.000.000,-	75%	Rp. 440.000.000,-	80%	Rp. 440.000.000,-				

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng Jawab	Lokasi
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target				Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
							Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Daerah kabupaten/Kota													
		2	2	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 100.000.0 00,-	1 Dokumen	Rp. 100.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 100.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 100.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 100.000.0 00,-		
		2	2	0	2	0	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang berkompeten di Bidang Statistik	N/A	2 Orang	Rp. 20.000.00 0,-	1 Orang	Rp. 10.000.000 ,-	1 Orang	Rp. 10.000.000, -	1 Orang	Rp. 10.000.000 ,-	1 Orang	Rp. 10.000.00 0,-		
		2	2	0	2	0	Membangun Metadada Statistik Sektoral	Jumlah Meta Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	N/A	1 Dokumen	Rp. 75.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 75.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 75.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 75.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 75.000.00 0,-		
		2	2	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	N/A	35 Orang	Rp. 75.000.00 0,-	35 Orang	Rp. 75.000.000 ,-	35 Orang	Rp. 75.000.000, -	35 Orang	Rp. 75.000.000 ,-	35 Orang	Rp. 75.000.00 0,-		
		2	2	0	2	0	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	N/A	1 Unit	Rp. 150.000.0 00,-	1 Unit	Rp. 100.000.00 0,-	1 Unit	Rp. 100.000.00 0,-	1 Unit	Rp. 100.000.00 0,-	1 Unit	Rp. 100.000.0 00,-		
		2	2	0	2	0	Penyelenggaraa n Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	N/A	2 Dokumen	Rp. 80.000.00 0,-	2 Dokumen	Rp. 80.000.000 ,-	2 Dokumen	Rp. 80.000.000, -	2 Dokumen	Rp. 80.000.000 ,-	2 Dokumen	Rp. 80.000.00 0,-		
		2	2	1			URUSAN Pemerintah Bidang Persandian			-	Rp. 152.787.5 00,-	-	Rp. 159.800.00 0,-	-	Rp. 159.800.00 0,-		Rp. 159.800.00 0,-		Rp. 159.800.0 00,-		
	Menin gkatny a keama nan infor masi daer ah	2	2	0	2		PROGRAM PENYELENG GARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		(Rendah)	Rp. 152.787.5 00,-	(Rendah)	Rp. 159.800.00 0,-	Tinggi	Rp. 159.800.00 0,-	Tinggi	Rp. 159.800.00 0,-	Tinggi	Rp. 159.800.0 00,-	Bidang Keamana n Infor masi dan Persandia n	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target				Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran								
							N INFORMASI															
		2	2	0	2.		Penyelenggara an Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			50	Rp. 142.787.5 00,-	52	Rp. 149.800.00 0,-	54	Rp. 159.800.00 0,-	56	Rp. 159.800.00 0,-	56	Rp. 159.800.00 0,-			
		2	2	0	2.	0	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen (Firewall, C-sirt)	Rp. 10.000.00 0,-	1 Dokumen	Rp. 12.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 12.000.000, -	1 Dokumen	Rp. 12.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 12.000.000 ,-	1 Dokumen	Rp. 12.000.00 0,-		
		2	2	0	2.	0	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 77.800.00 0,-	1 Laporan	Rp. 77.800.000 ,-	1 Laporan	Rp. 77.800.000, -	1 Laporan	Rp. 77.800.000 ,-	1 Laporan	Rp. 77.800.000 ,-	1 Laporan	Rp. 77.800.00 0,-		
		2	2	0	2.	0	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 24.987.50 0,-	1 Laporan	Rp. 30.000.000 ,-	1 Laporan	Rp. 30.000.000, -	1 Laporan	Rp. 30.000.000 ,-	1 Laporan	Rp. 30.000.000 ,-	1 Laporan	Rp. 30.000.00 0,-		
		2	2	0	2.	0	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	10 Perangkat Daerah	Rp. 30.000.00 0,-	10 Perangkat Daerah	Rp. 30.000.000 ,-	10 Perangkat Daerah	Rp. 30.000.000, -	10 Perangkat Daerah	Rp. 30.000.000 ,-	10 Perangkat Daerah	Rp. 30.000.00 0,-	10 Perangkat Daerah	Rp. 30.000.00 0,-		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencana an	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggu ng jawab	Lokasi
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target				Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
		2	2	0	2.		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	N/A	20	Rp. 10.000.000,-	20	Rp. 10.000.000,-	20	Rp. 10.000.000,-	20	Rp. 10.000.000,-	20	Rp. 10.000.000,-		
		2	2	0	2.	0	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	N/A	5 Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000,-	5 Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000,-	5 Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000,-	5 Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000,-	5 Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000,-		
										-	Rp. 9.680.032. 580,-	-	Rp. 12.354.504. .770,-	-	Rp. 11.540.657. 660,-		Rp. 11.367.079. .240,-		Rp. 11.367.07 9.240,-		

BAB – VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah ditahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026.

Berikut Indikator Kinerja Diskominfo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026

Sasaran RPD	Indikator Sasaran	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
							Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan layanan Publik berbasis Elektronik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Predikat SAKIP	B	BB	BB	BB	BB
			Indeks SPBE	2,63	Meningkatkan layanan informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	89,33	89,33	89,33	89,33	89,33
				Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD	Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah Daerah	71	72	73	74	74	
					Persentase Pengelolaan SPBE	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	
					Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun	50	60	70	75	75

Sasaran RPD	Indikator Sasaran	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
							Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	
						perencanaan pembangunan daerah					
						Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	50	60	70	75	75
					Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks KAMI	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi

BAB – VIII P E N U T U P

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut melalui berbagai teknis analisa diantaranya analisis SWOT (strength, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 – 2026 sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Sarolangun, Maret 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN

Drs. MUHAMMAD IDRUS
Pembina Utama Muda / IV.c